



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PARADIGMA KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA YANG TERKAIT  
DENGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**TESIS**

**NAMA : SUSANTO BUDI RAHARJO**

**NPM : 0806474400**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JANUARI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PARADIGMA KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA YANG TERKAIT  
DENGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**NAMA : SUSANTO BUDI RAHARJO**

**NPM : 0806474400**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JAKARTA**

**JANUARI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**



**Nama : Susanto Budi Raharjo**  
**NPM : 0806474400**  
**Tanda Tangan :**  
**Tanggal : 14 Januari 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Susanto Budi Raharjo  
NPM : 0806474400  
Program Studi : Hukum dan Kehidupan Kenegaraan Program  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Judul Tesis : Paradigma Keadilan Substantif Dalm Putusan Mahkamah  
Konstitusi Pada Perkara Yang Terkait Dengan Pemilu  
Tahun 2009

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Kehidupan Kenegaraan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH (.....)

Penguji : Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, MH (.....)

Penguji : Dr. Fatmawati, SH MH (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH , selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini;
- (2) Prof. Satya Arinanto, SH, MH selaku Ketua Peminatan Program Hukum dan Kehidupan Kenegaraan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus sebagai dosen Penguji bersama Dr. Fatmawati SH, MH yang telah memberikan masukan berharga bagi penyempurnaan Tesis ini;
- (3) Pihak Sekretariat Jenderal KPU dan Pusat Penelitian dan Pengkajian MKRI yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan informasi yang saya perlukan;
- (4) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (5) Nursuhud, Agus Condro Prayitno, Eva Kusuma Sundari, Widada BW, Ananta Wahana, Arif Wibowo, Monang, Dedy Rachmadi, Doni Tri Istiqomah sebagai sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini; dan
- (6) Tim Desk Pilkada DPP PDI Perjuangan dan kawan-kawan yang lain yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian studi saya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Jakarta, 14 Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susanto Budi Raharjo  
NPM : 0806474400  
Program Studi : Hukum dan Kehidupan Kenegaraan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PARADIGMA KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA TERKAIT DENGAN PEMILIHAN UMUM 2009**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 2011

Yang menyatakan

(Susanto Budi Raharjo, SH)

## ABSTRAK

Nama : Susanto Budi Raharjo  
Program Studi : Hukum Kenegaraan  
Judul : **PARADIGMA KEADILAN SUBSTANTIF DALAM  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA  
PERKARA TERKAIT DENGAN PEMILIHAN UMUM  
2009**

Tesis ini membahas tentang Paradigma Keadilan Substantif yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang terkait dengan Pemilu Tahun 2009 yang mengesampingkan aspek-aspek procedural. Penelitian ini adalah kajian hukum normative dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Keadilan Substantif dapat tercapai tanpa mengesampingkan keadilan procedural perlu dilakukan perubahan berupa perbaikan dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu sehingga dapat mengakomodir hal-hal yang bersifat substantive sehingga tidak membelenggu hakim konstitusi dalam memutus perkara konstitusional terutama terkait dengan pemilu.

Kata kunci:

Keadilan Substantif, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum,

## ABSTRACT

Name : Susanto Budi Raharjo  
Study Program : Hukum Kenegaraan  
Title : **SUBSTANTIVE JUSTICE PARADIGM IN THE  
CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS ON CASES  
RELATING TO THE GENERAL ELECTION OF 2009**

This thesis discusses the paradigm of Substantive Justice that is reflected in several decisions of the Constitutional Court in cases related to General Elections in 2009 which set aside procedural aspects. The study was a normative legal studies with a descriptive design. The results suggested that Justice Substantive justice can be achieved without neglecting the necessary procedural changes in the form of improvements in the law relating to elections and the tasks of the Constitutional Court in the administration of elections so as to accommodate the things that are substantive, so do not fetter the constitutional judges of deciding constitutional matters, especially relating to the election.

Keywords:

Substantive Justice, Constitutional Court, Election



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GRAFIK .....	xi
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
4.2 Latar Belakang .....	1
4.2 Permasalahan .....	7
4.2 Tujuan Penelitian.....	8
4.2 Manfaat Penelitian .....	8
4.2 Metode Penelitian .....	9
4.2 Kerangka Konseptual .....	11
4.2 Sistematika Penulisan .....	13
<b>2. KERANGKA TEORI .....</b>	<b>15</b>
4.2 Demokrasi .....	16
2..1. Demokrasi Langsung .....	19
2..2. Demokrasi Perwakilan .....	20
4.2 Pemilihan Umum .....	21
2..1. Sistem Pemilihan Umum .....	22
2..2. Perselisihan Hasil Pemilu .....	24
4.2 Mahkamah Konstitusi .....	27
2..1. Teori Konstitusi .....	27

2..2. Mahkamah Konstitusi sebagai <i>The Guardian of Constitution</i> ...	31
2..3. Putusan Mahkamah konstitusi .....	32
4.2 Teori Keadilan .....	34
2..1. Keadilan dalam beberapa persepektif aliran filsafat hukum .....	34
2..2. Keadilan Substantif versus Keadilan Prosedural .....	42
2..3. Keadilan Substantif dan Hukum Progressif.....	46
<b>3. PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
<b>PADA PEMILIHAN UMUM 2009</b> .....	<b>48</b>
4.2 Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia .....	48
3..1. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia .....	48
3..2. Sistem Pemilihan Umum dari masa ke masa .....	59
3..3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum .....	65
4.2 Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu 2009.....	73
3..1. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi.....	73
3..2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	77
3..3. Organisasi Mahkamah Konstitusi .....	79
3..4. Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara.....	82
4.2 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pemilihan Umum 2009	88
3..1. Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum.....	88
3..1.1. Putusan No. 22-24/PUU-VII/2008.....	91
3..1.2. Putusan No. 110-111-112-113 PUU-VII/2009.....	99
3..2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	106
3..2.1. Putusan No. 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009.....	107
3..2.2. Putusan No. 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009.....	113
3..2.3. Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009.....	116
<b>4. KEADILAN SUBSTANTIF PUTUSAN</b>	
<b>MAHKMAH KONSTITUSI</b> .....	<b>119</b>
4.2 Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Positivistik .....	119
4..1. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi .....	119

4..2. Pengabaian Keadilan Prosedural dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	133
4.2 Argumen Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	135
4..1. Menegakkan Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	135
4..2. Argumen Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	142
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>152</b>
4.2 Kesimpulan.....	152
4.2 Saran.....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>159</b>
Buku .....	159
Artikel/Makalah/Jurnal/Internet .....	162
Peraturan Perundang-Undangan .....	163
Putusan Pengadilan .....	164

## DAFTAR TABEL

1. Tabel. 1. Perolehan Suara Pemilu 1955.....	50
2. Tabel. 2. Perolehan Suara Pemilu 1971 .....	51
3. Tabel. 3. Perolehan Suara Pemilu 1977 – 1997.....	52
4. Tabel. 4. Perolehan Suara Pemilu 1999 .....	54
5. Tabel. 5. Perolehan Suara Pemilu Tahun 2004.....	57
6. Tabel. 6. Perolehan Suara Pemilihan Pemilu Tahun 2009.....	58
7. Tabel. 7. Statistika Perkara Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2009 .....	73
8. Tabel. 8. Perkiraan Perolehan Kursi akibat Putusan MA.....	104
9. Tabel. 9 Perubahan Perolehan Kursi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74–80–94–59–67/PHPU.C-VII/2009 ....	112
10. Tabel. 10. Matrik Perubahan Calon Anggota Terpilih akibat Putusan MK	113

## DAFTAR GRAFIK

1. Grafik. 1 Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2004.....	67
2. Grafik. 2 Statistika Putusan Mahkamah Konstitusi PHPU Tahun 2004.....	67
3. Grafik. 3 Frekuensi undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi Tahun 2009 .....	79